

Penerapan hak atas tanah untuk permukiman di atas air pada perairan pesisir kota Tanjungpinang dalam perspektif hukum tanah nasional = Implementation of land rights for settlements on the coastal waters of Tanjungpinang in the perspective of national land law

Mitra Wulandari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389016&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki permukiman di atas air pada perairan pesisir dengan pelantar-pelantar sebagai aksesnya. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama, turun-temurun, bahkan sudah menjadi bagian kekhasan budaya dari masyarakatnya. Sayangnya pengaturan mengenai hak atas tanah di kawasan tersebut belum ada. Permasalahannya adalah penerapan hak atas tanah di perairan pesisir tidak dapat begitu saja disamakan dengan daratan, mengingat rezim yang terkait tidak hanya bidang pertanahan, tetapi juga kelautan, lingkungan, dsb. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama, menjabarkan konsep Hukum Tanah Nasional dalam memenuhi penerapan hak atas tanah di perairan pesisir. Kedua, menjabarkan penerapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang sudah dilakukan Kantah Kota Tanjungpinang selama ini untuk permukiman di atas air perairan pesisirnya. Ketiga, menganalisis dan memberikan rekomendasi pengaturan terkait hak atas tanah untuk permukiman di atas air perairan pesisir Kota Tanjungpinang (sebagai antisipasi). Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait. Kesimpulannya, hak atas tanah yang paling tepat adalah Hak Pengelolaan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, kemudian diberikan kepada masyarakat yang bermukim di sana baik dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki kekuasaan yang efektif dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan permukiman tersebut, sehingga kondisi lingkungan dan berbagai aspek lainnya tetap terjaga

ABSTRACT

Tanjungpinang is one of the coastal cities that have settlements on the coastal waters with ?pelantar? as an access. The condition has been going on since long, hereditary, and become part of the cultural distinctiveness of the community. Unfortunately arrangements regarding land rights in the region does not exist. The problem is the application of the right to land in the coastal waters can not be equated with the mainland, given the associated regime not only in land, but also marine, environment, etc. This study has three objectives, first,

describes the concept of the National Land Law in the implementation of land rights in coastal waters. Second, describe the application of Hak Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai that has been given during Kantah Tanjungpinang for settlement on coastal waters. Third, gave the recommendations related to land rights arrangements for settlement on coastal waters in Tanjungpinang (as anticipation). The method used normative, that is checking library materials or secondary data related. The conclusion, Hak Pengelolaan submitted to the Government Tanjungpinang, then given to the people who live there either with Hak Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai above Hak Pengelolaan. It is intended that local governments have the authority to perform the functions of effective control over the ownership and control of land in the settlement area, and keep the environmental conditions and various other aspects remain intact